



**Farhan**  
Sekda Ketapang

Pengajuannya memang sudah ada, tapi saat ini masih dalam proses pembahasan dan verifikasi di tim internal Pemda.

## Tujuh Strategi

**KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki strategi khusus untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak**  
• Baca Halaman 7

2020 yang berkualitas.

"Strategi ini dimulai dari penyiapan data hingga antipasi kabar bohong atau hoaks," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik di Padang, Jumat (2/8).

Secara lebih spesifik dia merinci strategi itu, yaitu *pertama*, penyiapan DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu), - optimalisasi perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik.

*Kedua*, supervisi dan memfasilitasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada penyelenggara

Pilkada dan aparat keamanan. Lalu *ketiga*, memetakan potensi konflik dan cegah dini serta mengoptimalkan koordinasi horizontal-vertikal pada aspek-aspek yang dapat mengganggu.

*Empat*, dukungan peningkatan partisipasi pemilih, menetapkan hari libur pada saat pencoblosan, dan sosialisasi. *Lima*, penguatan regulasi dan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara dalam menegakkan Netralitas ASN.

*Keenam*, menyampaikan maklumat imbauan kepada calon kepala daerah/wakil ke-

pala daerah di antaranya agar aktif membangun kehidupan demokrasi, menjaga stabilitas dan mematuhi regulasi dalam pelaksanaan Pilkada.

Dan yang *terakhir*, pelibatan para pihak untuk mereduksi eksekutif perilaku penyebaran Hoaks dan Isu SARA. Dalam hal ini akan menggalang sinergi dengan lembaga lain seperti Komisi Penyiaran Independen (KPI).

Akmal menyebut tujuh hal itu merupakan hasil evaluasi sementara Kemendagri terhadap pelaksanaan Pemilu sebelumnya. Namun untuk penyempurnaan Direktorat Jendral

Otonomi Daerah Kemendagri terus melakukan berbagai kajian agar kesalahan-kesalahan dalam Pilkada Serentak yang lalu dapat diminimalkan atau dihilangkan.

"Dengan demikian pelaksanaan Pilkada dilaksanakan dengan penguatan dan parameter terhadap Indikator dalam mewujudkan Pilkada serentak yang berkualitas," katanya.

Sebanyak 270 daerah di Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 23 September 2020 masing-masing sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Tujuh di antaranya berada di Kalimantan Barat. (ant/bls)